

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB ini menyajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan gambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan dari pembangunan bidang agama dan pendidikan agama dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode sebelumnya (2015-2019). Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, ada yang sudah dicapai dan tentunya juga dalam proses capaian tersebut tentunya harus tetap menampung aspirasi-aspirasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup dinamis. Beberapa aspirasi tersebut didapatkan dari kotak saran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun yang disebar diseluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan juga dari Survey Kepuasan Masyarakat yang disebar disetiap KUA. Selain itu melalui *Forum Group Discussion* yang bertajuk “*Coffe Morning*” yang diikuti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan “*Ngopi: Ngobrol Pendidikan Islam*” bersama Kepala Madrasah juga dijadikan ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra sebelumnya, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “*Terwujudnya Masyarakat Tanjung Jabung Timur taat Beragama, Rukun, cerdas dan sejahtera lahir bathin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan Berprestasi, berlandaskan gotong royong*”.

Berdasarkan visi di atas, maka disimpulkan bahwa visi pembangunan pada periode Renstra Tahun 2015-2019 terbagi atas empat komponen, yaitu: *Taat beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera*. Dalam upaya mencapai upaya tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun 9 (sembilan) misi yang mendukungnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan;
2. Memperkokoh kerukunan umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
5. Meningkatkan mutu pendidikan Islam yang merata.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel;
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 9 (sembilan) tujuan dengan sasarannya beserta indikatornya masing-masing guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. *Misi pertama*, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan tujuan:
 - a) terwujudnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai Agama;
 - b) meningkatnya pelayanan kehidupan Beragama.
2. *Misi kedua*, meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dengan tujuan terwujudnya harmonisasi intern dan antar umat beragama.
3. *Misi ketiga*, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas dengan tujuan terwujudnya pelayanan yang prima bagi kehidupan umat

beragama melalui sarana dan prasarana, pengembangan kualitas SDM professional dan berbudaya.

4. *Misi keempat*, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas bertujuan terwujudnya peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis lainnya guna memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja.
5. *Misi kelima*, meningkatkan mutu pendidikan Islam dengan tujuan:
 - a) terwujudnya akses dan mutu pendidikan MI, MTs dan MA;
 - b) meningkatnya mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
6. *Misi keenam*, meningkatkan pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan tujuan terwujudnya akses dan mutu pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
7. *Misi ketujuh*, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji dan dengan tujuan:
 - a) terwujudnya penguatan sistem dan manajemen operasional Haji;
 - b) meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah Haji.
8. *Misi kedelapan*, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga sosial dengan tujuan :
 - a) terjalinnya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah;
 - b) terciptanya harmonisasi dengan Instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan.
9. *Misi kesembilan*, mewujudkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa dengan tujuan:
 - a) terwujudnya ketaatan karyawan/ti terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b) terciptanya sistem dan prosedur kerja yang benar dan tertib;
 - c) terwujudnya tata laksana pelayanan administrasi satuan kerja dan satuan pendidikan yang tertib;
 - d) meningkatnya kinerja dan akuntabilitas kinerja satuan kerja dan satuan pendidikan;
 - e) tersedianya inventaris kantor di Subbagian Tata Usaha;
 - f) terpeliharanya perawatan gedung kantor, inventaris kantor dan halaman kantor;
 - g) terbangunnya pembangunan gedung Kantor Urusan Agama, Madrasah, dan sarana penunjang lainnya yang representatif;

Dalam upaya untuk menyelaraskan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-3392/SJ/B.I.1/OT.01.2/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Indikator Utama Kinerja, kesembilan tujuan di atas disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, yakni:

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian sasaran yang dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan tujuan pembangunan disajikan dalam uraian berikut:

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, diantaranya; 1) Meningkatnya jumlah kegiatan ritual keagamaan, dan 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama ini, maka dilakukan kegiatan yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama yaitu Penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung

Jabung Timur telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) festival-festival keagamaan lainnya, seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1
Festival Keagamaan

No.	Agama	Kegiatan	Tahun	Tuan Rumah	Prestasi
Festival Keagamaan Tingkat Kabupaten					
1.	Islam	MTQ Kabupaten	2015	Tidak Tahu	Tidak Tahu
			2016	Tidak Tahu	Tidak Tahu
			2017	Tidak Tahu	Tidak Tahu
			2018	Tidak Tahu	Tidak Tahu
			2019	Tidak Tahu	Tidak Tahu
Festival Keagamaan Tingkat Provinsi					
2.	Islam	MTQ Provinsi	2015	Tebo	Juara Umum – Sarolangun
			2016	Merangin	Juara Umum – Kota Jambi
			2017	Tanjab Timur	Juara Umum – Kota Jambi
			2018	Batanghari	Juara Umum – Tanjab Timur
			2019	Bungo	Juara Umum – Tanjab Timur

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu mengikutsertakan ASN maupun Non ASN binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan festival keagamaan lainnya, seperti tabel berikut ini:

Tabel 2
Festival Keagamaan Lainnya

No.	Kegiatan	Tahun	Prestasi
Tingkat Provinsi			
1.	Musabaqah Qiraat Kutub (MBK)	2015	Juara 1
		2016	Juara 1
		2017	Juara 1
		2018	Juara 1
		2019	Juara 1
2.	Karya Tulis Ilmiah bagi Penghulu	2015	Juara 1
		2016	Juara 1
		2017	Juara 1
		2018	Juara 1
		2019	Juara 1
3.	Bintang Vokalis/ Qasidah	2015	Juara 1
		2016	Juara 1
		2017	Juara 1
		2018	Juara 1
		2019	Juara 1
4.	Penyuluh Agama Islam Teladan	2015	Juara 1
		2016	Juara 1
		2017	Juara 1
		2018	Juara 1
		2019	Juara 1

Tingkat Nasional		
1.	Musabaqah Qiraat Kutub (MBK)	2015 Juara 1
		2016 Juara 1
		2017 Juara 1
		2018 Juara 1
		2019 Juara 1
2.	Karya Tulis Ilmiah bagi Penghulu	2015 Juara 1
		2016 Juara 1
		2017 Juara 1
		2018 Juara 1
		2019 Juara 1
3.	Bintang Vokalis/ Qasidah	2015 Juara 1
		2016 Juara 1
		2017 Juara 1
		2018 Juara 1
		2019 Juara 1
4.	Penyuluh Agama Islam Teladan	2015 Juara 1
		2016 Juara 1
		2017 Juara 1
		2018 Juara 1
		2019 Juara 1

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Penyuluh Agama Islam yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penyuluh Agama Islam
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	Kecamatan	Jumlah Penyuluh Agama Islam		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	Muara Sabak Timur	-	8	8
2.	Nipah Panjang	1	8	9
3.	Mendahara	-	9	9
4.	Dendang	-	8	8
5.	Rantau Rasau	-	8	8
6.	Sadu	1	9	10
7.	Muara Sabak Barat	2	9	11
8.	Mendahara Ulu	1	8	9
9.	Berbak	2	8	10
10.	Kuala Jambi	-	8	8
11.	Geragai	1	8	9

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, didukung dengan berbagai kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:

- a. Pengajian Bulanan Penyuluh Agama Islam untuk membahas masalah kekinian yang menimbulkan polemik dalam masyarakat;
- b. Penyuluh melakukan Safari Zikir dan Ruqiyah, Istighosah dan Shalat tasbeih bersama masyarakat;
- c. Melakukan Kerjasama Lintas Sektoral antara Penyuluh Agama Islam dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemberantasan Narkoba dengan penobatan sebagai Duta Anti Narkoba;
- d. Melakukan kerjasama lintas sektoral untuk mengawal keberagaman dan keberagaman umat beragama;
- e. Verifikasi Lembaga Keagamaan; dan
- f. Pengembangan dan Penguatan Sistem Informasi Keagamaan atau penyuluhan berbasis IT.

1.1.2. Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat yang Beragama

Upaya untuk mencapai suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan sosial ditandai dengan: (1) Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama, dan (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama tingkat Kabupaten

Dalam upaya memperkuat Harmonisasi dalam kehidupan beragama, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten berupaya meredam berbagai potensi yang dapat menimbulkan konflik Horizontal di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan persoalan Agama diantaranya dengan menyelesaikan 3 (tiga) konflik antar umat beragama berikut:

- 1) Konflik pendirian rumah ibadat di Kecamatan Rantau Rasau;
- 2) Konflik pendirian rumah ibadat di Kecamatan Muara Sabak Barat;
- 3) Konflik terhadap YSPMA di Kecamatan Berbak

Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa menjalin kerjasama Lintas Sektoral yang saling terkait untuk terus menjaga keberagaman dan keharmonisan antar pemeluk agama yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan menjalin kerjasama tokoh Lintas Agama untuk berperan aktif menentramkan umat beragama masing-masing.

Selanjutnya, untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi; (2) kesetaraan; dan (3) kerja sama.

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan sosial.



Pembinaan Kerukunan Umat bergama minoritas



Silaturahmi Kerukunan umat beragama

1.1.2.1. Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama

Sebagai salah satu upaya meningkatkan harmonisasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan sosialisasi regulasi terkait dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Adapun manfaat dari pelaksanaan program sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi pembinaan kerukunan umat beragama terutama PBM 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan masyarakat dalam pendirian rumah ibadah menjadi sangat krusial dalam rangka menjaga konflik di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas disebabkan karena masalah pendirian rumah ibadah.

1.1.2.2. Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah:

1. *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*
2. *Dialog Moderasi Beragama*
3. *Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama*

1.1.2.3. Peningkatan Kapasitas Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama

Dalam rangka mewujudkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, maka dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama dalam bentuk:

1. *Dialog Antar Umat Beragama*
2. *Dialog Inter Umat Beragama*

Adapun manfaat dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, baik tokoh, pemuda dan perempuan lintas agama dapat mempercepat membangun kesadaran pentingnya menjaga kerukunan umat beragama, serta memperluas ruang dialog lintas agama.

1.1.3. Pemenuhan Kebutuhan akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan keagamaan pada level Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dilihat dari: (1) Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar; (2) Jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi; (3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; dan (4) Jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

1.1.3.1. Pendistribusian Kitab Suci

Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendistribusikan Al-Qur'an yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi selama kurun waktu dari tahun 2017-2019 sebanyak 70 Buah ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selain itu terkumpul Al-Qur'an dari setiap calon penganten yang merupakan salah satu program Kepala KUA dan Penghulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 sebanyak 8018 Buah Untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti korban kebakaran dan di salurkan setiap bulan ramadhan tiba ke masjid-masjid yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kehidupan umat beragama.

Tabel 4
Data Penerimaan Al-Qur'an Dari calon Penganten

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	627
2.	2017	1.170
3.	2018	1.375
4.	2019	2.718
5.	2010	2.128
Jumlah Keseluruhan		8.018

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Penyaluran Bantuan Al-Qur'an pada kegiatan TMMD di Nipah panjang



Penyaluran Bantuan Al-Qur'an pada korban kebakaran

1.1.3.2. Pengembangan Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah selain sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil mendorong masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah seperti takmimasjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah rumah ibadah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Data Rumah Ibadah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Rumah Ibadah	Jumlah	Jumlah Pemeluk Agama
1.	Masjid/Langgar	787	217.033
2.	Gereja (Kristen)	34	2.282
3.	Gereja (Katolik)	4	543
4.	Pura	1	38
Jumlah		826	219.985

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Selain kehadiran rumah ibadah yang nyaman, kehadiran penyuluh yang memberikan pemahaman dan pengajaran dalam beragama menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan perekrutan Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS secara terbuka untuk umum guna peningkatan kualitas penyuluh agama Islam pada tahun 2016 dan 2019 yang berjumlah sebanyak 91 Orang yang tersebar pada setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun jumlah Penyuluh Agama Islam Fungsional sebanyak 11 Orang. Jumlah keseluruhan Penyuluh Agama Islam sebanyak 101 Orang.

Untuk meningkatkan kualitas Penyuluh agama Islam telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan Penyuluh Agama Islam dan Pengajian bulanan Penyuluh yang dimotori oleh Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) yang membahas masalah-masalah kekinian yang menimbulkan polemik dalam masyarakat.

Selain itu prestasi membanggakan dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tanjung Jabung Timur terukir sampai ke Jenjang Nasional.

Tabel 6
Data Prestasi Penyuluh Agama Islam

No.	Nama	Prestasi	Tahun
1.	M. Irfan Ilmi, S.Sos.I.,M.Pd.I	Penyuluh Agama Islam PNS Teladan Provinsi Jambi	2016
2.	Purnawati, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam Non PNS Teladan Provinsi Jambi	2016
3.	Hasanah Tartilah, S.HI	Penyuluh Agama Islam PNS Teladan Nasional	2017
4.	Abdul Mutalib, SS.,M.H	Penyuluh Agama Islam PNS Teladan Nasional	2019
5.	M. Awaluddin, S.Sy.,M.H	Penyuluh Agama Islam Non PNS Teladan Provinsi Jambi	2019

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Pemilihan Penyuluh Teladan Nasional Tahun 2017



Pemilihan Penyuluh Teladan Nasional Tahun 2019



Pemilihan Penyuluh Teladan Tk. Propinsi Jambi Tahun 2019

1.1.3.3. Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Berdasarkan PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi : (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan

Dari 9 (sembilan) fungsi tersebut, ada 6 (enam) yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Melihat begitu strategis peran dan fungsinya menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA pada tahun 2016-2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 11 KUA, yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan yang terbagi pada tipologi:

Tabel 7
Data KUA berdasarkan Tipologi

No	Tipologi	Jumlah
1.	D1	1
2.	D2	1
3.	C	9

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Jika menilik keberadaan KUA, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan penghulu, karena berdasarkan PMA nomor 34 Tahun 2016, bahwa Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu dengan tugas tambahan. Secara historis keberadaan penghulu juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4, tugas penghulu adalah:

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
2. Pengawasan pencatatan NR;
3. Pelaksanaan pelayanan NR,
4. Penasehatan dan konsultasi NR;
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
7. Pembinaan keluarga sakinah;
8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Perkembangan kebutuhan penghulu searah dengan perkembangan wilayah dan penduduk muslim yang ada di provinsi Jambi. Beberapa program dilakukan untuk mencukupi kebutuhan penghulu, antara lain: (1) Assesmen calon penghulu dari jabatan lain; (2) Inpassing jabatan Kepala KUA non penghulu; (3) Pembentukan jabatan penghulu melalui

diklat pembentukan jabatan penghulu; dan (4) Pengembalian jabatan penghulu. jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi dari tahun 2015-2019 yang terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adapun jumlah penghulu sebanyak 17 Orang, dan 11 Orang diantaranya mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA pada Kecamatan yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk memudahkan koordinasi sesama penghulu terbentuklah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Tahun 2020 yang sebelumnya terikat pada Kelompok Kerja Penghulu (POKJAHULU). Jumlah Penghulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 8
Data Penghulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Penghulu
1	Muara Sabak Timur	2 Orang
2	Nipah Panjang	3 Orang
3	Mendahara	1 Orang
4	Dendang	1 Orang
5	Rantau Rasau	2 Orang
6	Sadu	1 Orang
7	Muara Sabak Barat	2 Orang
8	Mendahara Ulu	1 Orang
9	Berbak	1 Orang
10	Kuala Jambi	1 Orang
11	Geragai	2 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Dari tabel tersebut bila dibandingkan dengan rasio penduduk Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 219.985 dengan jumlah penghulu berjumlah 17 Orang, sangatlah wajar bila dalam pelayanan belum maksimal, meski dalam kenyataannya penghulu berusaha untuk bekerja maksimal dalam melakukan pelayanan dalam wilayah kerja masing-masing. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pengaduan ketidakpuasan masyarakat yang tidak terselesaikan dengan baik. Dalam hal ini terbukti dari tahun 2015-2019 tidak ada satu pun pengaduan layanan KUA dari masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu penghulu Kabupaten Tanjung Jabung timur selalu ikut serta dalam meningkatkan Kualitas diri dan pelayanan dalam masyarakat. Hal ini terbukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba Kepala KUA Teladan, Musabaqah Qiraatul Kutub dan Karya Tulis Ilmiah bagi Penghulu.

Tabel 9
Data Kegiatan Lomba Kepala KUA dan Penghulu

No.	Nama	Kegiatan	Tahun
1.	A. Manaf Syahbudi, S.Th.I	MBK Nasional	2015
2.	Achmad Zulfikar, SS	MBK Nasional	2016
3.	Budiman, S.Ag	MBK Nasional	2017
4.	Rudik Noor Rohmad, S.HI.,M.H	KTI Nasional	2017
5.	Abd. Ghapar, S.Ag.,M.Pd	KTI Propinsi	2018
6.	Sumardi, S.Sos.I	KUA Teladan Nasional	2018
7.	Jamaluddin, S.HI	KUA Teladan Propinsi	2019

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Selain itu, untuk pengembangan diri dalam menghadapi problema dalam masyarakat yang kekinian APRI mengadakan kajian bulanan berupa Bahtsul Masaail Penghulu yang dilakukan setiap bulannya untuk dapat menghadapi dan membantu masyarakat menjawab tantangan dalam kehidupan keberagamaan dan keberagaman.



Kegiatan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia



Kegiatan Penghulu Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1.1.3.4. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga

Salah satu penyebab meningkatnya kasus perceraian adalah kurangnya pemahaman dan komitmen calon pengantin ketika menikah. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat perkawinan di bawah umur, Sesuai data yang diperoleh dari Pengadilan Agama meningkatnya Dispensasi usia Kawin tahun 2017 sebanyak 26 Kasus, tahun 2018 sebanyak 34 Kasus, tahun 2019 sebanyak 37 kasus, dan tahun 2020 meningkat signifikan 56 kasus hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat, terutama masyarakat bugis yang memang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengawinkan anak di bawah usia kawin sebagai prestise keberhasilan orangtua.

Tabel 10
Data Nikah dan Cerai Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nikah	Cerai	Prosentase
1.	2016	1.669	209	13 %
2.	2017	1.881	431	23 %
3.	2018	1.823	435	23 %
4.	2019	1.660	326	20 %
5.	2020	1.058	285	27 %
Jumlah		8.091	1.686	20,84%

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Hal ini menjadikan kursus calon pengantin (Suscatin) dianggap kurang maksimal dan mulai tahun 2017, Kementerian Agama telah memunculkan program baru sebagai revitalisasi suscatin dengan istilah Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Kegiatan Bimbingan Perkawinan pranikah bagi remaja diharapkan mampu mengurangi intensitas perkawinan di bawah usia kawin untuk mengurangi angka perceraian bagi usia muda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 11
Data Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	Tahun	Bimbingan Perkawinan Pranikah		Jumlah
		Calon Penganten	Usia Remaja	
1	2018	30 Pasang	30 Pasang	60 Pasang
2	2019	56 Pasang	30 Pasang	86 Pasang

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Kegiatan Bimwin Pranikah bagi Calon Pengantin

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilaksanakan dalam beberapa program, yaitu bimbingan perkawinan pra nikah untuk calon pengantin, bimbingan perkawinan pra nikah untuk remaja usia nikah dan bimbingan perkawinan untuk pasangan muda, dan saat ini telah ada 4 orang fasilitator bimbingan perkawinan yang bersertifikat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaksanaan Binwin ini diharapkan mampu memberikan bekal yang cukup bagi calon penganten untuk memasuki fase baru dalam membina rumah tangga agar mampu mengelola konflik menjadikan rumah tangga semakin solid dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, mengingat semakin tingginya angka perceraian usia muda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir.

Selain Program Binwin pra nikah calon penganten dan binwin pra nikah remaja, Program Pembinaan Keluarga sakinah yang dimotori oleh Penyuluh Agama Islam juga diharapkan mampu mengurangi angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Kegiatan Bimwin Pranikah bagi Rema Usia Nikah

1.1.3.5. Layanan *One Stop Service KUA*

Untuk memberikan pelayanan prima Bimbingan Masyarakat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerjasama dalam memberikan pelayanan *Three In One* yaitu pergantian identitas kependudukan sesaat setelah menikah dengan langsung memberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Duplikat Akta Nikah sesaat setelah melakukan prosesi akad nikah. Gebrakan ini sebagai langkah cepat bagi Kementerian Agama dan Dukcapil dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam proses percepatan dalam pelayanan kependudukan bagi penganten pasca menikah.



Pengantin Menerima KK, KTP dan Buku Nikah sesaa setelah Akad Nikah

Layanan *Three On One KUA* terwujud berkat kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Penandatanganan MoU Layanan One Stop Service KUA

Selain layanan Three In One pada Program One Stop Service KUA juga mengintegrasikan pembayaran Pencatatan Nikah Luar Kantor yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Layanan ini bertujuan mempermudah calon pengantin yang akan menikah diluar kantor dan diluar jam kerja untuk menyetorkan biaya nikahnya. Setelah mendaftarkan berkas pernikahannya, calon pengantin akan menerima nomor billing setoran PNBP, dengan adanya mesin EDC di KUA calon pengantin tidak perlu lagi ke Bank atau POS untuk menyetorkan PNBPnya.



Penyerahan Mesin EDC pada Kepala KUA

1.1.3.6. Layanan Produk Halal

Pengurusan sertifikasi Halal sejak Oktober 2019 telah beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mensosialisasikan layanan produk halal melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, selain itu mensosialisasikan pada Penyuluh Agama Islam Non PNS yang merupakan salah satu tupoksi dari PAI Non PNS yang ada di Kecamatan untuk mensosialisasikan pada jamaah majelis taklim yang ada di kecamatan masing-masing. Adapun Layanan produk halal saat ini Kantor Kementerian Agama memberikan rekomendasi ke Kantor Kementerian Agama Propinsi Jambi, saat ini belum ada pelaku usaha yang mendaftar hanya mencari informasi seputar layanan Produk Halal. Proses sertifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi SiHalal secara daring, langsung terhubung dengan BPJPH Pusat dan *progress*-nya dapat dipantau oleh pelaku usaha. Meski administrasi penerbitan sertifikasi halal telah berpindah dari MUI ke Kementerian Agama, namun penentuan kehalalan melalui pengkajian ilmiah dan sidang fatwa halal tetap merupakan kewenangan MUI.

1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan adalah dengan Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf.

Sesuai dengan realisasi Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 mencapai Rp.4.460.625.332,- dari target Rp.5.493.400.000,-. pertahun, namun demikian penghimpunan zakat yang dapat dilakukan baru sebagian kecilnya saja. Untuk mengoptimalkan potensi zakat, beberapa kebijakan telah dilakukan Pemerintah antara lain, telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan telah di terbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan, Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendorong dan memfasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi, integrasi *database* muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), *database* BAZNAS, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa melakukan Koordinasi tentang Penghimpunan dan Pendistribusian zakat.

Tabel 12
Data Dana Zakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015 s.d 2019

No.	Tahun	Rencana	Realisasi
01	2015	Rp.0	Rp.0
02	2016	Rp.1.150.000.000,-	Rp.1.189.040.371,-
03	2017	Rp.1.750.000.000,-	Rp.3.117.703.751,-
04	2018	Rp.4.178.000.000,-	Rp.3.479.377.520,-
05	2019	Rp.5.493.400.000,-	Rp.4.460.625.332,-

Sumber: Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Untuk sektor wakaf, Kementerian Agama melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai *database* aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf diseluruh tanah air. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan ditanah air. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri pada tahun 2019 yang dikukuhkan pada tanggal 28 Juli 2020 menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam mendorong perkembangan wakaf nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kementerian Agama pada

tahun anggaran 2018 memberikan bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) sebagai dana operasional organisasi.

Langkah penting Kementerian Agama untuk melindungi tanah wakaf adalah melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut didukung dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun 2019 Kementerian Agama memberikan bantuan *Billboard* (Papan Merk) Tanah Wakaf.

Tabel 13
Data Tanah Wakaf Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2015 s.d 2019

No.	Tahun	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
01	2015	215	204
02	2016	220	210
03	2017	231	205
04	2018	240	197
05	2019	252	186

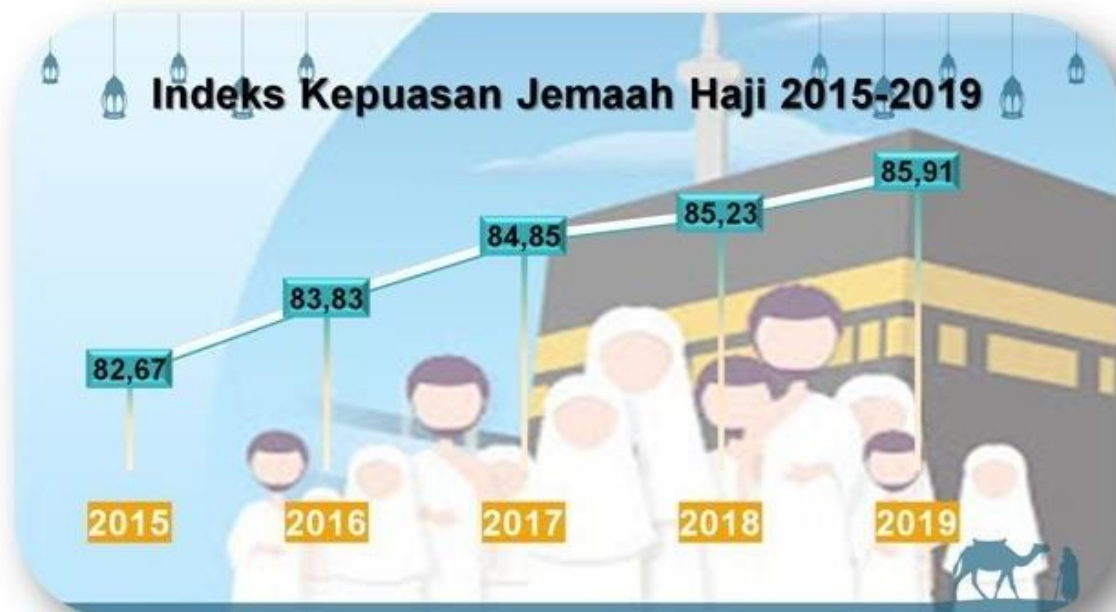
Sumber: Penyelenggara Zakat dan Wakaf

1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Nilai peningkatan kualitas Pelayanan Seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel dalam melayani Pendaftaran calon Jamaah haji ditandai dengan dua indikasi :

1. Meningkatnya nilai kepuasan Layanan Jemaah Haji sesuai angket;
2. Jumlah jemaah haji dan umrah yang terlayani.

Salah satu bentuk upaya peningkatan Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui Angket Kepuasan Jemaah Haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. Pelaksanaan Angket tersebut telah dimulai sejak musim haji tahun 2010 secara berkelanjutan hingga saat ini yang dilakukan dengan metode ilmiah dan *scientific*. Angket tersebut dilakukan untuk menggali informasi tentang berbagai aspek dan dimensi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama berada di Arab Saudi. Pelaksanaan Angket dilakukan dengan memberikan instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi responden, dan melalui pengamatan (*observasi*) langsung di lapangan selama pelaksanaan dan setelah kembalinya Jamaah haji dari Arab Saudi. Selain angket dari responden yang di gali informasinya, Kantor Kementerian Agama kabupaten Tanjung Jabung Timur, melalui Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi juga, survey yang di lakukan Badan Pusat Statistik sebagai nilai Kepuasan layanan Jamaah Haji Dan Umrah, terbukti bahwa peningkatan kualitas layanan prima dari tahun ke tahun bertambah baik. Berikut ini indek kepuasan dari Badan Pusat statistik:



Sumber: Badan Pusat

Dari penilaian yang ditunjukkan hasil survey tersebut dapat terlihat cukup jelas bahwa indeks kepuasan jemaah haji menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Salah satu indikator pencapaian sasaran pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah yaitu terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar adalah persentase keterisian kuota haji reguler yang dapat dilihat pada tabel berikut.

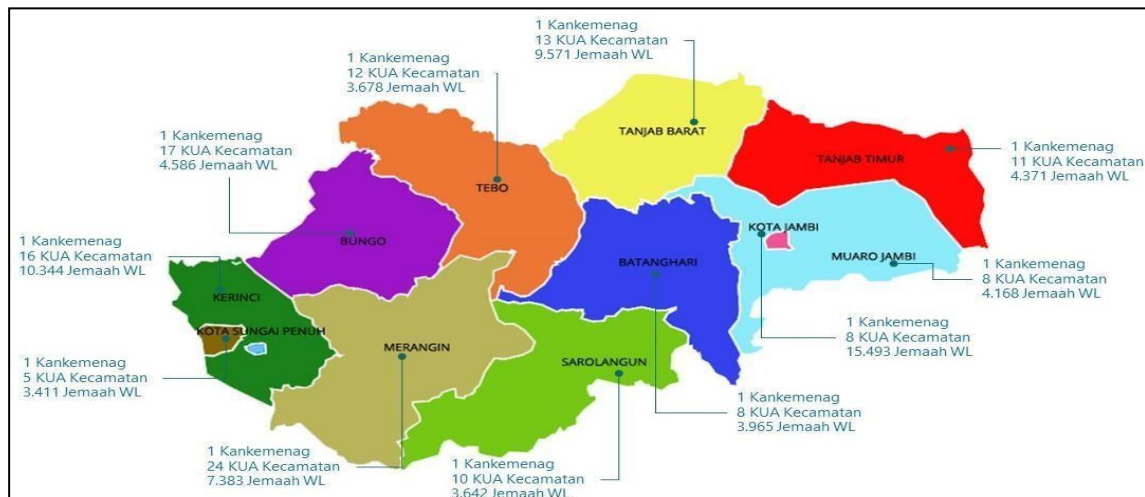
Tabel 14
Keterisian Kuota Haji Reguler Tahun 2015-2019

Tahun	Kuota	Terisi	%
2015	2.091	2.081	99,53
2016	2.091	2.085	99,72
2017	2.900	2.900	100,00
2018	2.899	2.877	99,25
2019	3.253	3.253	100,00
Total	13.234	13.196	99,70

Sumber: Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah Jemaah haji yang mengisi kuota per tahun selalu diatas 90% dari kuota yang disediakan. Dan secara keseluruhan, jumlah Jemaah haji yang telah terlayani tahun 2015-2019 telah mencapai 13.196 orang.

Selain dari unsur internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi, pelaksanaan kegiatan pada program Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Adanya integrasi dalam distribusi data dan informasi merupakan komponen penting yang menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan pelayanan ibadah haji di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Selain melibatkan satuan kerja internal Kementerian Agama, pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah juga melibatkan instansi maupun pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, TNI/Polri, maskapai penerbangan, bank penerima setoran Bipih. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dalam pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah ini tentu membutuhkan koordinasi yang baik guna membangun sinergi antar lembaga sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga tidak terjadi benturan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan haji dan umrah.

Sejak Tahun 2015 pelaksanaan operasional pemberangkatan haji dilakukan melalui Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi (EHA). Peningkatan status Asrama haji Jambi menjadi **Embarkasi Haji Antara** bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Jemaah Haji Provinsi Jambi. Peningkatan layanan dimaksud meliputi:

1. Layanan Konsumsi Jemaah Haji sebanyak 3 kali saat keberangkatan menuju Arab Saudi (2 kali di Asrama Haji Jambi dan 1 kali saat transit Bandara Hang Nadim Batam) dan 2 kali saat kepulangan Jemaah haji dari Arab Saudi (1 kali saat transit Bandara Hang Nadim Batam dan 1 kali di Asrama Haji Jambi).
2. Layanan Akomodasi yaitu penginapan di Asrama Haji 1 hari sebelum keberangkatan dan 1 hari saat kepulangan ke daerah asal.
3. Layanan transportasi domestik berupa *charter flight* rute Jambi-Batam-Jambi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan transportasi darat dari Kabupaten Kota ke Asrama Haji Jambi menuju Bandara Sultan Thaha Jambi.
4. Layanan Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan saat Jemaah haji masuk asrama Haji Jambi pada H-1 keberangkatan dan pemberian bekal obat-obatan bagi Jemaah haji resiko tinggi.
5. Layanan keimigrasian yang dilakukan pada saat sebelum keberangkatan ke Bandara Hang Nadim Batam meliputi; pemeriksaan paspor dan stempel keimigrasian.
6. Layanan Biometrik yang sebelumnya dilakukan di Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah, dilakukan di Asrama Haji Jambi untuk mengurangi bertumpuknya Jemaah saat tiba di Arab Saudi (Past track)
7. Pemberian *Living Cost* sebesar \$1.500.
8. Pemberian souvenir berupa bekal makanan abon ikan patin bagi Jemaah Haji Provinsi Jambi.
9. Pemantapan Bimbingan Manasik Haji yang dilakukan ketika jemaah menginap di Asrama Haji Jambi sebelum keberangkatan.

Peningkatan status menjadi Embarkasi Haji Antara merupakan upaya mendekatkan berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah haji, yang tentunya sangat berpengaruh pada sosiopsikologis jamaah haji dan keluarga yang ditinggalkan.

Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Provinsi Jambi dilakukan dalam berbagai kegiatan antara lain:

1. Pelayanan Haji Dalam Negeri

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pelayanan haji dalam negeri adalah meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri yang antara lain dilakukan dengan:

a. Usulan Gedung Pelayanan Haji terpadu (SBSN)

Pada tahun anggaran 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengusulkan Pembangunan Gedung Pelayanan Haji terpadu yang di biaya oleh SBSN harapan kedepan agar Pelayanan, dimulai Pendaftaran, keberangkatan sampai kepulangan Jamaah Haji mendapat Pelayanan yang Optimal. Adapun dengan adanya Gedung Pelayanan Haji Terpadu, Para Calon Jamaah Haji Pendaftar dapat mempersingkat waktu dan Efisiensi pendaftaran Karena semua Pihak yang terkait berada dalam Satu gedung Pelayanan.

b. Pelayanan Pendaftaran Haji

Saat ini aturan tentang Sistem Pendaftaran Haji yang terbaru melalui PMA No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler telah mampu memangkas birokrasi dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Namun faktor kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan masih belum maksimal. Maka dari itu, diperlukan langkah untuk mewujudkan hal tersebut dengan membangun lokasi pendaftaran haji yang memenuhi standar pelayanan agar menciptakan pelayanan efisien, efektif, serta menjamin keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang dilayani. Sehingga calon jamaah tidak perlu harus berpindah-pindah tempat sabhbat proses pendaftaran haji. Begitu pula saat jamaah akan memilih penyelenggara ibadah haji khusus/umrah, disediakan ruang untuk penerimaan pendaftaran haji khusus/umrah yang akan dilayani langsung oleh penyelenggara ibadah haji khusus/penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Upaya pemenuhan standar pelayanan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada periode 2015-2019 telah dilakukan secara bertahap.



Suasana Pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji

Tabel 15
Data Mendaftar Jemaah Haji
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Sabak Timur	134	205	189	129	59
2	Nipah Panjang	103	102	167	102	91
3	Mendahara	235	193	137	110	54
4	Dendang	38	46	40	31	28
5	Rantau Rasau	33	76	52	51	34
6	Sadu	24	44	60	35	41
7	Muara Sabak Barat	23	31	60	60	70
8	Mendahara Ulu	78	50	45	33	12
9	Berbak	0	3	16	10	0
10	Kuala Jambi	33	38	24	32	19
11	Geragai	35	21	47	25	43
Jumlah		736	809	837	618	451

Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh

2. Pembinaan Haji dan Umrah

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembinaan haji dan umrah adalah meningkatnya kualitas pembinaan haji dan umrah yang antara lain dilakukan dengan:

a. Pelatihan Petugas Haji tingkat Daerah

Upaya meningkatkan kualitas petugas haji antara lain dilakukan dengan memberikan pembekalan dan pelatihan setiap tahunnya, yang dilaksanakan dengan melibatkan narasumber dari unsur pejabat terkait, ahli maupun praktisi perhajian secara profesional. Proses pembekalan petugas haji ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa petugas haji yang profesional, kompeten dan memiliki karakter serta komitmen pelayanan.

b. Sertifikat Para Pembimbing Manasik Haji

Kegiatan Pembimbing manasik haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol pada tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 2 orang.

1.1.6. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Dalam upaya meningkatkan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka dilakukan dengan melihat indikator: Meningkatnya persentase temuan audit Itjen/BPK/BPKP yang ditindaklanjuti. Akan tetapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menetapkan indikator ini di dalam Renstra 2015-2019. Namun demikian, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan ini sebagai berikut:

1.1.6.1. Opini Laporan Keuangan

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI dan pada empat tahun terakhir ini (2016-2019) berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kementerian Agama sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan oleh kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik dari masing-masing satuan kerja Kementerian di Pusat dan Daerah, termasuk salah satunya Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel
Perkembangan Predikat Laporan Keuangan 2015-2019

Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
WTP		✓	✓	✓	✓
WTP DPP	✓				
WDP					
TMP					

Sumber: Subbag TU, 2019

1.1.6.2. Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan sejak tahun 2014, capaian pembangunan Zona Integritas terus meningkat pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, uraian dari area perubahan tersebut adalah:

1. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

- Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
- Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- Ditetapkannya agen perubahan masa kerja 2018 sd 2020;

- e. Ditetapkannya prosedur pemberian reward, punishment bagi pemberi layanan dan kompensasi bagi penerima layanan;
- f. Pemasangan maklumat pelayanan di setiap ruangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan KUA.

2. *Penataan Tatalaksana*

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit menggunakan aplikasi e-kinerja, LRA, SAS, OMSPAN, Aplikasi IKM, dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan aplikasi SIMPEG, untuk mengelola tata persuratan Kemenag Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan aplikasi tata persuratan. Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Silakon JSS, Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SISKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2020 ini direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. *Penguatan Akuntabilitas*

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Capaian dari program ini adalah:

- a. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
- d. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan;
- e. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan;
- f. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja);
- g. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)
- h. Memiliki IKU tambahan yang SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity);
- i. Laporan kinerja disusun tepat waktu;
- j. Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya);
- k. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja;
- l. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja;
- m. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
- n. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek;
- o. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

4. *Penataan Sistem SDM*

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- f. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap bulan.

5. *Penguatan Pengawasan*

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan dibentuknya unit pengendali gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim penanganan *whistle blowing system*;
- e. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Dicitak sticker, banner, leaflet dan standing banner sebagai public campaign.

6. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik seperti: PTSP, Smart Office, Simkah, Siskohat, Siwak, Simbi, Simas, dsb;
- b. Indeks kepuasan masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada ditingkat sangat memuaskan.

1.1.7. **Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan**

Indikator dari tercapainya peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu: Meningkatnya (1) APK RA/Pratama Widya Pasraman, (2) APK MI/Ula/SDTK/Adhi

Widya Pasraman, (3) APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman, (4) APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman, (5) APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman, (6) APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman, (7) APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Lembaga Pendidikan umum berciri khas agama diampu oleh Seksi Pendidikan Madrasah, sedangkan Pendidikan Keagamaan diampu oleh Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Sementara untuk pendidikan agama dan keagamaan lainnya dikoordinir langsung oleh bidang masing-masing di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi.

Berikut ini disajikan tabel untuk rincian jenis dan jenjang layanan Pendidikan Islam dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur 2019

Tabel
Layanan Pendidikan Islam dan Keagamaan Islam
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	Jenis Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1.	Pendidikan Umum Berciri Khas Agama	RA	6	240
		MI	24	1.736
		MTs	31	2.004
		MA	24	1.730
2.	Pendidikan Keagamaan Islam	Pendidikan Pesantren Muadalah	1	316
		Pendidikan DTA	93	6563
		Pondok Pesantren	10	1.393
		TPQ	11	321

Sumber: Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Upaya Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan Lembaga Pendidikan, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagi MI, MTs, dan MA. Sedangkan untuk RA Bantuan Operasional Pendidikan langsung diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi. Lainnya halnya dengan lembaga pendidikan keagamaan Islam, mengingat ketersediaan Anggaran dari Pemerintah Pusat yang sangat minim, maka diupayakan subsidi dana dari Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai tujuan ini juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2019.

Tabel
Jumlah Siswa Penerima PIP Tahun 2019

No.	Jenjang	Rekap Jumlah Siswa Penerima PIP
1	MI	878
2	MTs	1.159
3	MA	294
Total		2.331

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah

Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pendidikan DTA (Diniyah Takmiliyah Awaliyah) berupa alokasi

dana APBD Kabupaten untuk Insentif guru DTA. Sedangkan BAZNAS Kabupaten mengalokasikan anggaran Insentif guru pontren sebesar Rp. 10.000.000,- /tahun untuk setiap Pondok Pesantren. Selain itu, untuk tetap menjaga kesinambungan kegiatan diupayakan juga dana partisipasi pihak ketiga yang bersifat sukarela atau tidak mengikat. Beberapa kegiatan yang didanai oleh subsidi Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, yaitu:

1. Insentif guru DTA (Diniyah Takmiliah Awwaliyah) yang diperuntukkan kepada DTA yang ada di Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari 361 Orang guru dari 63 DTA yang sumber dananya dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang berlaku sejak 1 Januari 2020;
2. Insentif guru DTA (Diniyah Takmiliah Awwaliyah) yang diperuntukkan kepada DTA yang ada di Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari 127 Orang guru yang berasal dari 30 DTA yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlaku sejak 1 Januari 2015;
3. Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Diniyah Abdu Salam Desa Labuan Pering Kecamatan Sadu sebanyak 2 ruang yang sumber dananya dari ADD T.A 2019;
4. Bantuan Insentif Guru Pontren sebanyak 9 lembaga se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari dana BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2017;
5. Bantuan Dana Pengiriman Peserta Pentas PAI utusan Kabuapten Tanjung Jabung Timur ke ajang Pentas PAI tingkat Provinsi Jambi tahun 2019 dari Bank Syariah Mandiri, BRI Muara Sabak, Bank Jambi dan Bank Permata Syariah;
6. Bantuan Kegiatan Wirausaha Pondok Pesantren dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi berupa peternakan ayam buras di 2 (dua) Pondok Pesantren yaitu: Pondok Pesantren Al-Ishlah dan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor di tahun 2019;
7. Bantuan Laptop kepada Pengelola Sistem Informasi Pendidikan Diniyah (EMIS) sebanyak 11 (sebelas) unit dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019.

Sebagai indikator meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat maka digunakan nilai APK/APM. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Untuk melihat perkembangan capaian APK/APM pada tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel
APK/APM RA, MI, MTs dan MA

No.	Jenjang Pendidikan	Nilai	Target 2019	Capaian 2019
1	RA	APK	8,97%	
2	MI	APK	13,56%	
		APM	12,29%	
3	MTs	APK	24,68%	
		APM	19,19%	
4	MA	APK	11,15	
		APM	9,24	

Selain itu, meskipun bukan menjadi indikator meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan tetapi menjadi tolok ukur kemajuan pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun capaian tersebut adalah keikutsertaan peserta didik pada kegiatan-kegiatan atau even nasional, yaitu:

1. Pentas PAI Tk. Nasional di Makassar pada tanggal 9 Oktober 2019 yang mengutus 5 orang siswa mewakili Provinsi Jambi pada cabang Nasyid dan Pidato;

2. Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Nasional (POSPENAS) di Bandung pada tanggal 25 s.d 30 November 2019 yang mengutus 3 orang siswa mewakili Provinsi Jambi pada cabang lomba pidato Bahasa Inggris 1 orang, Stand Up Comedy 1 orang dan Pencak Silat 1 orang;
3. Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Diniyah (PORSADIN) IV di Bangka Belitung pada tanggal 23 s.d 27 Oktober 2019 dengan mengutus 2 orang santri mewakili Provinsi Jambi;
4. Perkemahan Pramuka Santri Nasional (PPSN) yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 30 Oktober 2018 di Bumi Perkemahan Sungai Gelam Provinsi Jambi dengan mengirimkan 100 orang Pramuka Santri;
5. Musabaqah Qiraatul Kutub Nasional (MQKN) tahun 2017 di Jepara pada tanggal 1 s.d 5 Desember 2017.

1.1.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan ditandai oleh 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Meningkatnya rata-rata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs;
2. Meningkatnya rata-rata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA; dan
3. Meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut:

Tabel
Data Nilai Rata-rata Hasil UN

No.	Jenjang	2015	2016	2017	2018	2019
1	MTs					
2	MA					

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/ sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebatas pada Agama Islam, hal ini untuk mencerminkan bahwa penyelenggaraan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanyalah pendidikan Agama Islam, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Tahun	Jenjang/ Nilai Rata-rata			
		SD	SMP	SMA	SMK
1.	2015				
2.	2016				
3.	2017				
4.	2018				
5.	2019				

Sumber: Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Tabel
Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Tahun	Jenjang/ Nilai Rata-rata	
		MIN	MTsN
1.	2015		
2.	2016		
3.	2017		
4.	2018		
5.	2019		

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama hampir dalam agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahun 2018, aspek- aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 75, capaian siswa madrasah di Propinsi Jambi baru sebesar 71,6. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah Provinsi Jambi dalam pengukuran indeks integritas mencapai 100 dari angka target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk di atasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada masa-masa mendatang.

1.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan dari Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, yaitu:

1. Tingginya partisipasi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengikuti berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh Masyarakat
2. Berkembangnya berbagai media penyebaran Pendidikan keagamaan seperti TV dan internet memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan upaya Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, yaitu:

1. Indikator jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah tidak dapat dijadikan ukuran tingkat keimanan seorang pemeluk agama, karena dengan tidak hadir di rumah ibadah seseorang dapat dianggap kualitas keimanannya kurang;
2. Tidak terdaptarnya rumah ibadah pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Tanjung Jabung Timur di khawatirkan menjadi celah yang bisa menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial antar umat beragama.

1.2.2. Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional, yaitu:

1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
2. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Kerjasama lintas agama dalam pelaksanaan festival keagamaan, seperti saat pengamanan kedatangan Ustadz Abdul Somad saat mengisi tablig akbar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pengamanannya dilakukan oleh Pemud Kristen Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik.

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional, yaitu:

1. Amanat PBM belum dilaksanakan secara optimal;
2. Tidak semua aktor FKUB yang memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;
3. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3. Pemenuhan Kebutuhan akan Pelayanan Kehidupan yang Berkualitas dan Merata

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata, yaitu:

1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontiniu;
2. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 11 KUA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
4. Terlaksananya kegiatan Bimbingan perkawinan bagi calon penganten dan remaja usia nikah.

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata, yaitu:

1. Belum maksimalnya pendistribusian kitab suci di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena minimnya jumlah kitab suci yang dimiliki;
2. Masih ada KUA yang rusak berat dan rusak ringan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti di Mendahara, Nipah Panjang, Kuala Jambi yang masuk kategori rusak berat, sedangkan Dendang, Muara Sabak Timur, Berbak dan Rantau Rasau masuk kategori rusak ringan;
3. Jumlah tenaga penyuluh agama, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
4. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja.

1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Potensi yang dapat mendukung peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan, yaitu: Potensi dana sosial keagamaan yang terus meningkat setiap tahun.

Sedangkan permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan, yaitu: Belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan yang terkumpul dalam meningkatkan ekonomi umat, dan untuk dana zakat yang dihitung untuk sementara hanya terbatas pada BAZNAS.

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Beberapa potensi yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu:

1. Pendaftaran calon Jemaah haji semakin meningkat, melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat intensif;
2. Pemanfaatan Embarkasi Haji Antara di Provinsi Jambi yang mempermudah pengaturan calon Jemaah Haji sebelum berangkat menuju Embarkasi Haji Batam;
3. Pengembangan produk hukum terkait pelayanan Haji dari tahun ke tahun.

Sedangkan permasalahan yang dapat menghambat upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu:

1. Meningkatnya pendaftaran calon Jemaah Haji menimbulkan dampak pada waktu menunggu keberangkatan yang sangat Panjang;

2. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini mendekati waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan masalah nasional yang terjadi setiap tahun. Pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji.

1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Potensi yang dapat mendukung upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yaitu: Meningkatkan Inovasi-inovasi terkait Reformasi Birokrasi.

Sedangkan permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yaitu: Belum terintegrasi nya database pada aplikasi-aplikasi yang diluncurkan sehingga menyebabkan begitu banyaknya aplikasi yang harus digunakan.

1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
2. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya DTA/Pontren memperlihatkan trend yang terus meningkat.
3. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
4. Dukungan pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan Insentif guru DTA responnya cukup baik.
5. Dukungan dana Insentif Guru Pontren dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur rutin setiap tahun.

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
3. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan;
4. BOP untuk Diniyah Takmiliyah belum ada anggaran dalam DIPA
5. Anggaran pengadaan buku paket Diniyah Takmiliyah tidak ada;
6. Anggaran bantuan rehab gedung/ruang belajar DTA tidak ada.

1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

1. Meningkatkan prestasi santri di berbagai event nasional;

2. Penerapan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif;
3. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat.
4. Program pengembangan pendidikan khusus di Pondok Pesantren (Tahfizhul Qur'an, Wirausaha).

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

1. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasana penunjangnya;
2. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap dan masih banyak guru yang belum tersertifikasi (66 orang) belum sertifikasi.
3. Rasio jumlah siswa pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.
4. Program pengembangan kompetensi guru belum berjalan sebagaimana mestinya.
5. Program pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru pendidikan keagamaan islam (DTA, Pontren, TPQ) sangat minim.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
2. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
3. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
4. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu agar dapat terus bersekolah.

Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggara Madrasah karna baru sebagian desa yang menganggarkan tunjangan untuk guru non pns pada madrasah;
3. Proporsi dana BOS yang disediakan oleh pemerintah masih kecil dibandingkan kebutuhan penyelenggara pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah: **“Kementerian Agama yang Profesional dan Andal dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”**. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu:

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk mencapai misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan tujuan berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dan menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2. Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 41 (empat puluh satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Evaluasi Nilai kinerja Penyuluh Agama Islam;
2. Persentase Penyuluh Agama Islam yang dibina;
3. Jumlah penjiar agama yang dibina kompetensi;
4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas; penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama; 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama; 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a) Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b) Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c) Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a) Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b) Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan antar umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a) Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b) Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
5. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a) Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a) Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b) Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - c) Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah, sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - d) Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama.

9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

- Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai, yaitu: jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat Wisata religi, Situs, Artefak ke Kecamatan Berbak Makam Rang Kayo Hitam
- Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah even keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran hari besar keagamaan, seperti budaya mandi safar di Kecamatan Sadu yang dilaksanakan setiap hari rabu terakhir di bulan safar setiap tahunnya.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.	<ol style="list-style-type: none">Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan;Terwujudnya penyelenggaraan ibadah Haji yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi.
- Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan.
 - Memaksimalkan Pelayanan one stop Service
- Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah pra nikah dan pasca nikah untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran.	Meningkatnya kualitas assesmen dan kemampuan berfikir siswa.

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku;
 - b. Persentase madrasah menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - d. Jumlah madrasah melaksanakan program keterampilan/kejuruan;
 - e. Persentase prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring.
2. Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase guru yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah;
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa;
 - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi
3. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel diatas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase Madrasah di daerah 3 T yang ditingkatkan mutunya;
2. Meningkatkan pemberian bantaun pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah siswa penerima BOS pada madrasah;
 - b. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah;
3. Menguatnya pelayanan 1 tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan 2. Meningkatkan kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategi dan sasaran program pada tabel diatas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi kompetensi minimal.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase calon pengawas madrasah yang menerma beasiswa S2.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadallah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.

2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase MTs/MA yang meintegrasikan pendidikan dalam pembelajaran;
 - b. Persentase madrasah yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembang pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis;
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
 - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
 - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel.
 - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel.
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;

- b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing;
 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai):
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
 9. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
 10. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN.
 11. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
 12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
 13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
 14. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
 15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;

16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
17. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
18. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
19. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
20. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

2.2.1. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab dan sumber data indikator sasaran kegiatan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2.2. Nilai-nilai Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan dibidang agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-nilai Dasar, meliputi:

1. Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. Membina kerukunan hidup beragama;
- g. Tidak bertindak diskriminatif;
- h. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun oranglain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepatwaktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan. Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaantugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaanse penuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di KementerianAgama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jamkerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat. Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki strategi melalui 5 (lima) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah;
4. Program Pendidikan Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Islam.

Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
2. Pembinaan Administrasi Umum dan;
3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
4. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
6. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
9. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;
10. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
11. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
12. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
13. Pembinaan Haji;
14. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi menetapkan 6 (enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 47 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kanwil Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB 2. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

3.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai.

Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri.

Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan 2024 pada tabel berikut:

Tabel
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 5 (Lima) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENAG TANJAB TIMUR						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.098.461					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-					
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-					
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.248.790					
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-					
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-					
Pembinaan Administrasi Umum	849.671					
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-					
Program Kerukunan Umat Beragama	40.000					
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000					
Program Bimbingan Masyarakat Islam	6.728.441					
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	532.350					
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	14.500					
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.147.900					
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	-					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	5.033.691					
Program Pendidikan Islam	28.156.417					
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	9.561.994					
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	-					
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	5.879.000					
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	7.210.200					
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	5.505.223					
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	658.454					
Pelayanan Haji Dalam Negeri	25.300					
Pembinaan Haji	25.480					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	607.674					

Sumber: Urs. Perencanaan Subbag TU, 2020

Tabel
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENAG TANJAB TIMUR		26.768.132	29.464.445	32.398.390	35.666.729	124.297.696
Program Dukungan Manajemen		24.368.058	26.824.364	29.494.300	32.472.230	113.158.952
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		-	15.000	-	25.000	40.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		22.600	-	27.346	-	49.946
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		1.224.358	1.346.794	1.481.473	1.629.620	5.682.245
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		-	24.860		30.081	54.941
Pembinaan Administrasi Perencanaan		5.000	10.000	15.000	20.000	50.000
Pembinaan Administrasi Umum		892.147	981.362	1.079.498	1.187.448	4.140.454
		9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		593.674	653.041	718.346	790.180	2.755.241
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan Umrah		16.461.180	18.107.298	19.918.028	21.909.831	76.396.336
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		5.160.099	5.676.109	6.243.720	6.868.092	23.948.019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam						
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		1.826.574	2.009.231	2.210.155	2.431.170	8.477.130
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		550.444	605.488	666.037	732.641	2.554.611
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		1.176.350	1.293.985	1.423.384	1.565.722	5.459.440
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		4.500	4.950	5.445	5.990	20.885
Pelayanan Haji Dalam Negeri		32.980	36.278	39.906	43.896	153.060
Pembinaan Haji		7.860	8.646	9.511	10.462	36.478
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		2.940	3.234	3.557	3.913	13.645
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		-	-	-	-	-
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		-	-	-	-	-
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		547.500	602.250	662.475	728.723	2.540.948
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		547.500	602.250	662.475	728.723	2.540.948

Sumber: Urs. Perencanaan Subbag TU, 2020

BAB IV

PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKAK/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan lebih terukur dan terevaluasi.

Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen darisemua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jamrizal

Tabel .
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data	Periode Pelaporan IKSK
1.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama;	1. Nilai kinerja penyuluh agama; 2. Persentase penyuluh agama yang dibina; 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi; 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;	1. Menggunakan Instrumen/Aplikasi Penyuluh Agama (PNS); 2. Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama; 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensinya; 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Tahunan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama;	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti; 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina; 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina;	1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100%; 2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan; 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan.	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa	Triwulanan
3.	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi; 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat; 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	Subbag TU	Subbag TU	Triwulanan
4.	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB.	Subbag TU	Subbag TU	Triwulanan
5.	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama;	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan;	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa	Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama.	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa	Tahunan
7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;	1. Persentase rumah ibadah yang ramah; 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina. 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya; 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.	1. Jumlah rumah ibadah yang ramah; 2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah; 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya; 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam).	Subbag TU, Bimas Islam	Subbag TU, Bimas Islam	Tahunan
8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik;	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKS	Sumber Data	Periode Pelaporan IKS
9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama;	<ol style="list-style-type: none"> Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; Persentase guru/dstg. pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah, sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama; 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan; Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 	Pendma, PAKIs	Pendma, PAKIs	Tahunan
10.	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam;	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pesantren yang berwawasan moderat; Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an; 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah pesantren; Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%; 	PAPKIs	PAPKIs	Tahunan
11.	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat;	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Semester
12.	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi;	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan);	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan);	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU	Tahunan
13.	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan;	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang ada; Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang tersedia; Jumlah lembaga keagamaan di bagi jumlah pemeluk agama di kali 100%. 	Subbag TU, Bimas Islam	Subbag TU, Bimas Islam	Tahunan
14.	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk(Islam);	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah KUA yang direvitalisasi; Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana; Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah; Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah; 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah KUA yang direvitalisasi dari SBSN; Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana; Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah; Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah; 	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan Tahunan Bulanan Bulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKS	Sumber Data	Periode Pelaporan IKS
		5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan.	5. Jumlah pengantin yang memperoleh buku nikah dan kartu nikah.			Semester
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga;	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya.	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya.	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran badah haji;	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan; 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.	1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah 2. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji.	Peny. Haji dan Umrah	Peny. Haji dan Umrah	Tahunan
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji;	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan; 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.	1. Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan; 2. Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji.	Peny. Haji dan Umrah	Peny. Haji dan Umrah	Tahunan
18.	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji;	1. Persentase petugas haji yang profesional; 2. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji; 3. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan; 4. Jumlah advokasi haji yang terselenggara; 5. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat;	1. Jumlah calon petugas haji yang lulus seleksi dan telah 2. Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jemaah haji; 3. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan; 4. Jumlah advokasi haji yang terselenggara; 5. Jumlah pembimbing haji yang telah lulus diklat pembimbing haji profesional dibandingkan jumlah pembimbing yang terdata di Kementerian Agama.	Peny. Haji dan Umrah	Peny. Haji dan Umrah	Tahunan
19.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat;	1. Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai 2. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi; 3. Persentase lembaga zakat yang dibina.	1. Jumlah lembaga zakat yang terakreditasi sesuai Syariah; 2. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi; 3. Persentase lembaga zakat yang dibina.	Peny. Zakat dan Wakaf	Peny. Zakat dan Wakaf	Tahunan
20.	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf;	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina; 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina; 2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan.	Peny. Zakat dan Wakaf	Peny. Zakat dan Wakaf	Tahunan
21.	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat;	1. Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah; 2. Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan;	1. Jumlah partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah; 2. Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan.	Peny. Zakat dan Wakaf	Peny. Zakat dan Wakaf	Tahunan
22.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana paramitha/ dana kebajikan.	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan.	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/ dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKS	Sumber Data	Periode Pelaporan IKS
23.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku; 2. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode dalam kurikulum pembelajaran inovatif; 3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan; 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan; 5. Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring.	1. Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum dengan yang belum; 2. Jumlah Sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dengan yang belum Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan; 3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan; 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan; 5. Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring .	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
24.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan;	1. Persentase guru/ustadz madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah / sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 2. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan; 4. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa; 5. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi.	1. Jumlah guru/ustadz madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan ; 2. Perbandingan jumlah guru yang memenuhi standar penerima tunjangan dengan yang belum; 3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan; 4. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa; 5. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
25.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran;	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk pembelajaran; 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk pembelajaran;	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran; 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;	Pendma, PAPKIs	Pendma, PAPKIs	Tahunan
26.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM D66:D69sarana prasarana; 2. Persentase MI/ Ula/ SSDK/ Adhi memenuhi SPM sarana prasarana; 3. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana; 4. Persentase MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana;	1. Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana; 2. Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana; 3. Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana; 4. Jumlah MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	Pendma, PAPKIs, Subbag TU	Pendma, PAPKIs, Subbag TU	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data	Periode Pelaporan IKSK
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana. 6. Persentase Madrasah/ Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya; 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.	5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana; 6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya; 7. Perbandingan sekolah minggu yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan yang belum.			
27.	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat;	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah/ Sekolah Keagamaan/ PDF 2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ Pendidikan Keagamaan/ 3. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional;	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah/ Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah; 2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ Pendidikan Keagamaan/ PDF 3. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional;	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
28.	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah;	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP;	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP;	Pendma	Pendma	Tahunan
29.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	1. Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi; 2. Persentase kepala/ guru/ tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; 3. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.	1. Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi; 2. Persentase kepala/ guru/ tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; 3. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
30.	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal;	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
31.	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik;	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1; 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1; 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/ Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
32.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi;	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
33.	Meningkatnya budaya mutu pendidikan;	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKS	Sumber Data	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase siswa/ santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	2. Persentase siswa/ santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
34.	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan;	1. Persentase MTs/ MA/ SMP TK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran; 2. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	1. Persentase MTs/ MA/ SMP TK/SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran; 2. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
35.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan; 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina.	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan; 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina.	PAPKIs, Pendma	PAPKIs, Pendma	Tahunan
36.	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra;	1. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra; 2. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar.	1. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra; 2. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
37.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan aset BMN;	1. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja; 2. Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.	1. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja; 2. Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.	Subbag TU	Subbag TU	Triwulanan
38.	Meningkatnya ketersediaan data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel;	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel.	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel.	Subbag TU, Pendma, PAPKIs	Subbag TU, Pendma, PAPKIs	Semester
39.	Meningkatnya aset yang diinventarisasikan	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.	Subbag TU	Subbag TU	Semester
40.	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan;	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP.	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
41.	Meningkatnya ASN yang profesional;	1. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71); 2. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.	1. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71); 2. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.	Subbag TU	Subbag TU	Semester
42.	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan;	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat 2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	Subbag TU	Subbag TU	Semester

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKS	Sumber Data	Periode Pelaporan IKS
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal; 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal; 4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.			
43.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel;	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya; 2. Persentase tanah yang bersertifikat; 3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.	1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya; 2. Jumlah tanah yang bersertifikat; 3. Jumlah nilai Opname Physic (OP) BMN;	Subbag TU	Subbag TU	Semester
44.	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi;	1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis; 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi; 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis; 2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi; 3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
45.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi; 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas; 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	1. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi; 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas; 3. Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
46.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data; 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data; 2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra; 3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
47.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran;	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas; 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas; 2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
48.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor;	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.	Subbag TU	Subbag TU	Triwulanan
49.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu; 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik; 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen; 4. Persentase menurunnya lelang gagal;	1. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu; 2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik; 3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen; 4. Jumlah menurunnya lelang gagal;	Subbag TU	Subbag TU	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKS	Sumber Data	Periode Pelaporan IKS
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.	5. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding.			
50.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	Subbag TU	Subbag TU	Triwulanan
51.	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi; 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi; 2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.	Subbag TU	Subbag TU	Semester
52.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar; 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar; 2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.	Subbag TU, Pendma, PAKIs	Subbag TU, Pendma, PAKIs	Semester
53.	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan.	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	Subbag TU, Pendma, PAKIs	Subbag TU, Pendma, PAKIs	Triwulanan

Tabel .
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama;	1. Nilai kinerja penyuluh agama; 2. Persentase penyuluh agama yang dibina; 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi; 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;	NA 80 NA NA	90 95 5 300	Nilai % Orang Kelompok	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama;	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti; 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina; 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina;	100 NA NA	100 50 1	% Orang Desa	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi; 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	NA NA	50 4	Lembaga/Orang Keg	Subbag TU
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP;	100	100	%	Subbag TU
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama;	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama; 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.	100 NA	100 4	% Kegiatan	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama;	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.	100	100	%	Subbag TU, Bimas Islam, Penais Zawa
7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;	1. Persentase rumah ibadah yang ramah; 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.	80 30	100 90	% %	Subbag TU, Bimas Islam
8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik;	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	NA	10	Kegiatan/Konten	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU
9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama;	1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	10	10	%	Pendma,

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Persentase guru/ustadz pendidikan agama dimadrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi	20	20	%	PAPKIs
		3. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah, sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	30	30	%	Pendma, PAPKIs
		4. Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada satuan pendidikan yang bermuatan moderasi	10	10	Kegiatan	
10.	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam;	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	5	65	%	PAPKIs
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an;	5	15	%	
11.	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat;	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);	NA	3	Lokasi	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU
12.	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi;	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (haribesar keagamaan);	9	14	Event	Bimas Islam, Peny. Zawa Subbag TU
13.	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan;	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	NA	5	Paket	Subbag TU, Bimas Islam
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	NA	100	Buah	
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	65	70	%	
14.	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	Jumlah KUA yang direvitalisasi;	NA	5	KUA	Bimas Islam
		Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	NA	11	KUA	
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	100	400	Orang	
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	25	100	Anak	
		Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan.	1000	5000	Buku/ Kartu	
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga;	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya.	25	100	Keluarga	Bimas Islam

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran badah haji;	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan; 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan;	9,09 0,55	100 0,3	% %	Peny. Haji dan Umrah
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji;	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan; 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.	80 100	100 100	% %	Peny. Haji dan Umrah
18.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;	1. Persentase petugas haji yang profesional; 2. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji; 3. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan; 4. Jumlah advokasi haji yang terselenggara; 5. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat;	100 80 100 NA 2	100 95 100 NA 10	% % % Kasus Pembimbing	Peny. Haji dan Umrah
19.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat;	1. Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai 2. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi; 3. Persentase lembaga zakat yang dibina;	75 75 75	95 95 95	% % %	Peny. Zakat dan Wakaf
20.	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf;	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina; 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	NA 15	100 75	% Akta	Peny. Zakat dan Wakaf
21.	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat;	1. Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah; 2. Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan;	5 NA	10 10	% %	Peny. Zakat dan Wakaf
22.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana paramitha/ dana kebajikan.	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan.	0	5	Lembaga	Subbag TU
23.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku;	75	85	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode dalam kurikulum pembelajaran inovatif;	50	65	%	PAPKIs, Pendma
		3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	NA	2	Madrasah	
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan;	NA	1	Madrasah	
		5. Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring.	0	0	%	
24.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan;	1. Persentase guru/ustadz madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah / sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	NA	5	%	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	60	80	%	
		3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan;	NA	5	Penghargaan	
		4. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa	NA	2	Kegiatan	
		5. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi.	NA	85	%	
25.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran;	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk pembelajaran;	80	90	%	Pendma, PAPKIs
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk pembelajaran;	80	90	%	
26.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	NA	75	%	
		2. Persentase MI/ Ula/ SSDK/ Adhi memenuhi SPM sarana prasarana;	60	100	%	
		3. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	70	100	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		4. Persentase MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana;	70	100	%	Pendma, PAPKIs, Subbag TU
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana.	70	100	%	
		6. Persentase Madrasah/ Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;	0	0	%	
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana;	25	30	%	
27.	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah/ Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah;	NA	1500	Siswa	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ Pendidikan Keagamaan/ PDF	0,5	1.50	%	
		3. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional;	20	40	%	
28.	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah;	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP;	NA	100	Siswa	Pendma
29.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	1. Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;	NA	40	%	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase kepala/ guru/ tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	NA	40	%	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.	NA	40	%	
30.	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal;	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	85	95	%	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	85	95	%	
31.	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik;	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;	80	85	%	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;	10	30	%	
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1;	90	98	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2;	NA	100	%	
32.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi;	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	NA	2	Madrasah	PAPKIs, Pendma
33.	Meningkatnya budaya mutu pendidikan;	1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;	NA	1	%	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase siswa/ santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	1	1	%	
34.	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan;	1. Persentase MTs/ MA/ SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	NA	70	%	PAPKIs, Pendma
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	NA	50	%	
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	11	16	%	
35.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan;	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;	NA	5	Organisasi Ekstrakurikuler	PAPKIs, Pendma
		2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina.	NA	20	Gugus	
36.	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra;	1. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra;	65	100	%	Subbag TU
		2. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar;	10	10	Dokumen	
37.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan aset BMN;	1. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja;	99,14	99,24	%	Subbag TU
		2. Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.	90	100	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
38.	Meningkatnya ketersediaan data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel;	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel;	100	100	%	Subbag TU, Pendma, PAPIKs
39.	Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN;	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.	90	100	%	Subbag TU
40.	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan;	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP.	60	65	%	Subbag TU
41.	Meningkatnya ASN yang profesional;	1. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang minimum 71); 2. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	NA NA	80 80	% %	Subbag TU
42.	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan;	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu; 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK); 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal; 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	11 NA 80 NA	22 80 90 90	Dokumen % % %	Subbag TU, Pendma, PAPIKs, Bimas islam
43.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel;	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya; 2. Persentase tanah yang bersertifikat; 3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.	NA NA NA	80 80 80	% % %	Subbag TU, Pendma, PAPIKs, Bimas islam
44.	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi;	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis; 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi; 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	NA NA NA	80 80 80	% % %	Subbag TU
45.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	NA	80	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	NA	8	Satker	Subbag TU
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	NA	8	Orang	
46.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data;	80	90	%	Subbag TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;	80	90	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	80	90	%	
47.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran;	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	80	90	%	Subbag TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	80	90	%	
48.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor;	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.	60	85	%	Subbag TU
49.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	80	90	%	Subbag TU
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	80	90	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;	85	95	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal;	NA	95	%	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding;	NA	95	%	
50.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	70	90	%	Subbag TU
51.	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	NA	95	%	Subbag TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.	NA	95	%	
52.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;	NA	85	%	Subbag TU
		2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.	NA	90	%	
53.	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan.	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	100	100	%	Subbag TU

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENAG TANJAB TIMUR		26.768.132	29.464.445	32.398.390	35.666.729	124.297.696
Program Dukungan Manajemen		24.368.058	26.824.364	29.494.300	32.472.230	113.158.952
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		-	15.000	-	25.000	40.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		22.600	-	27.346	-	49.946
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		1.224.358	1.346.794	1.481.473	1.629.620	5.682.245
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		-	24.860		30.081	54.941
Pembinaan Administrasi Perencanaan		5.000	10.000	15.000	20.000	50.000
Pembinaan Administrasi Umum		892.147	981.362	1.079.498	1.187.448	4.140.454
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan Umrah		593.674	653.041	718.346	790.180	2.755.241
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		16.461.180	18.107.298	19.918.028	21.909.831	76.396.336
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		5.160.099	5.676.109	6.243.720	6.868.092	23.948.019
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		1.826.574	2.009.231	2.210.155	2.431.170	8.477.130
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		550.444	605.488	666.037	732.641	2.554.611
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		1.176.350	1.293.985	1.423.384	1.565.722	5.459.440
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		4.500	4.950	5.445	5.990	20.885
Pelayanan Haji Dalam Negeri		32.980	36.278	39.906	43.896	153.060
Pembinaan Haji		7.860	8.646	9.511	10.462	36.478
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		2.940	3.234	3.557	3.913	13.645
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		-	-	-	-	-
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		-	-	-	-	-

Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		547.500	602.250	662.475	728.723	2.540.948
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		547.500	602.250	662.475	728.723	2.540.948